LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN OLEH BADAN USAHA DALAM PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN, SERTA FORMAT YANG DIGUNAKAN OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN

(dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis)

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ..... Tanggal .....
Lampiran : - Dokumen Persyaratan
- Daftar isian permohonan
Hal : Permohonan Fasilitas*:
☐ KITE Pembebasan
☐ KITE Pengembalian
☐ KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC .... /Kepala KPU BC ....
c.q. Kepala Kantor Pabean ....

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor dan/atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dan/atau Perusahaan KITE Pengembalian.

2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan dan daftar isian permohonan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian dalam bentuk *soft copy.*

3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan bahwa:
   a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
   b. kami telah memiliki sistem informasi berbasis komputer (*IT Inventory*) sesuai ketentuan fasilitas KITE dan bersedia untuk dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak;
   c. badan usaha:
      1) tidak pemah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai;
      2) tidak ada satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau
      3) tidak mengalami pailit atau dipailitkan,

      yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit;
   d. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia dicabut keputusan penetapan sebagai fasilitas KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian jika di kemudian dokumen dan keterangan yang kami sampaikan kedapatan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:
   Nama : .....
   Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)** : .....
   Surat Tugas/Surat Kuasa No. : .....
   Telepon : .....
   Email

5. Berikut pas foto penanggung jawab perusahaan serta pegawai yang ditugaskan: ***)

Pas Foto Warna Ukuran 4x6	Pas Foto Warna Ukuran 4x6	Pas Foto Warna Ukuran 4x6	Pas Foto Warna Ukuran 4x6
Nama : ..... No. Identitas: ..... NPWP : ..... Alamat : ..... Jabatan :	Nama : ..... No. Identitas : ..... NPWP : ..... Alamat : ..... Jabatan :	Nama : ..... No. Identitas: ..... NPWP : ..... Alamat : ..... Jabatan :	Nama : ..... No. Identitas: ..... NPWP : ..... Alamat : ..... Jabatan : .....

Materai	Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/Direksi)****) .....

*) Diisi dengan tanda silang (x) sesuai dengan jenis permohonan fasilitas yang diajukan.
**) Coret yang tidak perlu.
***) Pas foto sesuai dengan jumlah penanggung jawab perusahaan yang ada, serta foto pegawai pengurus permohonan.
****) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya.

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

1.	Nama badan usaha	:	.....
2.	Nomor Induk Wajib Pajak	:	.....
3.	Nomor Induk Berusaha	:	.....
4.	Alamat kantor	:	.....
5.	Nomor telepon kantor	:	.....
6.	Nomor *faximile* kantor	:	.....
7.	Email kantor	:	.....
8.	Data penanggung jawab	:	.....

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

9.	Fasilitas kepabeanan yang telah digunakan	:	

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

10.	Asal perolehan barang dan bahan	:	.....
11.	Tujuan penjualan hasil produksi	:	.....

12.	Nilai investasi	:	.....

Awal Berdiri	
Saat Ini	

13.	Jumlah tenaga kerja	:	
14.	Data keuangan 2 (dua) tahun terakhir	:	

No.	Data Keuangan	Tahun	Tahun ....
a.	Aset Lancar		
b.	Total Aset		
c.	Utang Lancar		
d.	Total Utang		
e.	Modal		
f.	Laba/Rugi Bersih		

15.	Indikator kinerja utama *(key performance indicator)*	:	

No.	Indikator	Target
a.	PPh Badan Pasal 21	
b.	Devisa ekspor	
c.		

16.	Waktu kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi	:	

II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA

1.	Tempat pengolahan/pabrik	:	

No.	Alamat	Luas (M^2)	Status kepemilikan/ penguasaan	Bukti kepemilikan			Mulai	Berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2.	Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan*	:	

No.	Alamat	Luas (M^2)	Status kepemilikan/ penguasaan	Bukti kepemilikan			Mulai	Berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

*diisi dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan lokasi tempat pengolahan/pabrik.

III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

1.	Izin Usaha Industri (IUI)		
	a. Instansi penerbit IUI	:	.....
	b. Nomor IUI	:	.....
	c. Tanggal IUI	:	.....
	d. Bidang Usaha Industri	:	.....

2.	Kapasitas produksi sesuai IUI	:	

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
a.			
b.			
c.			

3.	Barang dan Bahan	:	

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Rencana Impor per tahun
a.				
b.				
c.				

4.	Hasil Produksi	:	

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.					
b.					
c.					

5.	Penerima subkontrak**	:	

No.	Nama penerima subkontrak	NPWP	IUI/ Dokumen sejenis lainnya	Nomor & Tanggal Kontrak	Alamat	Tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan
a.						
b.						
c.						

6.	Periode KITE Pembebasan	:	

** dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan.

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Usaha/Direksi)

.....

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
KITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

1. Diisi dengan nama badan usaha.
2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.
3. Diisi dengan Nomor Induk Berusaha.
4. Diisi dengan alamat kantor badan usaha.
5. Diisi dengan nomor telepon kantor badan usaha.
6. Diisi dengan nomor *faximile* kantor badan usaha.
7. Diisi dengan alamat email kantor badan usaha.
8. Diisi dengan data penanggung jawab perusahaan, berupa:
   a. Nama:
   b. Jabatan;
   c. Kartu identitas;
   d. Nomor kartu identitas;
   e. Nomor telepon/HP; dan
   f. Email.
9. Diisi dengan informasi mengenai fasilitas kepabeanan yang telah dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku, berupa:
   a. Jenis fasilitas;
   b. Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas; dan
   c. Lokasi.
10. Diisi dengan pilihan:
    a. Barang dan Bahan yang akan digunakan seluruhnya merupakan barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE; atau
    b. Barang dan Bahan yang akan digunakan sebagian merupakan barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE, dan sebagian lainnya bukan barang yang mendapatkan fasilitas KITE (barang asal lokal atau impor non fasilitas KITE).
11. Diisi dengan pilihan:
    a. Hasil produksi seluruhnya diekspor; atau
    b. Hasil produksi sebagian diekspor dan sebagian di jual ke dalam negeri.
12. Diisi dengan nilai investasi awal dan saat ini.
13. Diisi dengan jumlah tenaga kerja badan usaha.
14. Diisi dengan data keuangan sesuai laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir, berupa:
    a. Aset Lancar;
    b. Total Aset:
    c. Utang Lancar;
    d. Total Utang;
    e. Modal;
    f. Laba/Rugi Bersih.
15. Diisi dengan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, paling kurang memuat informasi mengenai target devisa ekspor dan target PPh badan Pasal 21. Indikator lain yang bisa ditambahkan untuk diisi seperti nilai investasi dan jumlah tenaga kerja.
16. Diisi dengan tanggal kesiapan badan usaha untuk dilakukan pemeriksaan lokasi.

DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA

1. Diisi dengan data lokasi tempat pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE, berupa:
   a. Alamat;
   b. Luas, dalam satuan meter persegi;
   c. Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa;
   d. Jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
   e. Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik;
   f. berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.
2. Diisi dengan data lokasi tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE, berupa:
   a. Alamat;
   b. Luas, dalam satuan meter persegi;
   c. Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa;
   d. Jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
   e. Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik;
   f. berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.

II. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

1. Diisi dengan data Izin Usaha Industri berupa:
   a. Instansi penerbit IUI;
   b. Nomor IUI;
   c. Tanggal IUI;
   d. Bidang Usaha Industri.

2. Diisi dengan daftar hasil produksi baik yang diekspor maupun dijual ke dalam negeri serta kapasitas produksi sesuai IUI, yang terdiri dari data berupa:
   a. uraian hasil produksi;
   b. jenis satuan; dan
   c. kapasitas produksi per tahun sesuai IUI.
3. Diisi dengan daftar barang dan bahan yang akan diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE, yang terdiri dari data berupa:
   d. kode HS barang dan bahan, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS;
   e. uraian barang dan bahan;
   f. jenis satuan; dan
   g. perkiraan jumlah barang dan bahan yang akan diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE dalam 1 (satu) tahun.
4. Diisi dengan daftar hasil produksi yang diekspor, yang terdiri dari data berupa:
   a. kode HS hasil produksi, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS;
   b. uraian hasil produksi;
   c. jenis satuan;
   d. masa produksi per jenis hasil produksi, yaitu waktu yang dimulai dari proses dari barang diminta oleh bagian produksi untuk dilakukan produksi atau dikirim ke badan usaha subkontrak sampai menghasilkan barang jadi untuk diekspor, dalam satuan Hari.
   e. perkiraan jumlah hasil produksi yang akan diekspor dalam 1 (satu) tahun.
5. Diisi dengan data penerima subkontrak yang menggunakan barang dan bahan asal fasilitas KITE, terdiri dari:
   a. nama penerima subkontrak;
   b. NPWP penerima subkontrak;
   c. Nomor Izin Usaha Industri atau dokumen sejenisnya;
   d. Nomor dan tanggal kontrak perusahaan dengan penerima subkontrak;
   e. alamat penerima subkontrak;
   f. tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan, dengan pilihan tahapan sebagai berikut: awal, dalam proses, atau akhir.
6. Diisi dengan periode KITE Pembebasan yang diajukan oleh badan usaha, dalam satuan Bulan.

FORMAT TANDA TERIMA

KOP SURAT KANTOR PABEAN

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN .....

Nomor : .....
Tanggal : .....

Yth. Pimpinan Badan Usaha .....
di .....

Berdasarkan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal ..... dengan ini kami sampaikan bahwa berkas permohonan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut.

Petugas,

TTD

TATA CARA PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Penilaian SPI dilakukan dengan cara menilai komponen sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	memiliki struktur organisasi yang jelas			
2.	memiliki uraian atau deskripsi tugas *(job description*) dari setiap bagian dalam struktur organisasi			
3.	adanya otorisasi oleh pihak yang berwenang atas setiap proses bisnis terkait pemasukan dan pengeluaran barang			
4.	memiliki sistem dan SOP yang memadai antara lain meliputi: a. pemesanan dan pembelian barang b. penerimaan dan pemasukan barang c. pengeluaran/pemakaian barang untuk proses produksi d. pemasukan dan pengeluaran hasil produksi e. pencatatan dan pembukuan atas transaksi pemasukan dan pengeluaran barang f. pemeriksaan atau pencacahan fisik barang			
5.	pengkodean terhadap persediaan barang dan bahan			
6.	memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen			

Kesimpulan	
Nama Pejabat Penilai	
Jabatan	
Tanda Tangan	

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor ..... No. ..... tanggal ..... serta menindaklanjuti surat permohonan fasilitas KITE badan usaha ..... No ..... tanggal ....., telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Nama Badan Usaha : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat kantor : .....
4. Alamat Pabrik : .....
5. Email resmi : .....
6. Nama pemilik/penanggung jawab : .....
7. Alamat pemilik/penanggung jawab : .....
8. Bidang usaha industri : .....
9. Hasil produksi : .....

Kegiatan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan/Kesimpulan
I. Penelitian (validasi) dokumen dan administrasi	.....
II. Analisa kriteria dan persyaratan	
a. SPI	.....
b. *IT Inventory*	.....
c. Profil Badan Usaha	.....
III. Pemeriksaan lapangan	
a. Pabrik/Kegiatan Produksi	
1) tempat penimbunan Barang dan Bahan	(lokasi)
2) tempat penimbunan Hasil Produksi	(lokasi)
3) Pabrik/tempat pengolahan	(lokasi)
4) Kegiatan pengolahan/pemasangan/perakitan	(diisi proses produksi perusahaan)
b. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan	
1) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di dalam Pabrik	(lokasi)
2) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di luar Pabrik	(lokasi)
c. Badan Usaha Penerima Subkontrak	
1) Pabrik	.....
2) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan	.....
d. Informasi lainnya	.....

Lampiran:
1. Foto lokasi
2. Foto dan daftar mesin atau barang modal;
3. Denah dan peta lokasi .....
4. Lain-lain

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai,

.....

.....

.....

FORMAT PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	**Tidak**	**Keterangan**
1.	**Persyaratan dokumen dan administrasi**			
2.	**Komitmen badan usaha dalam melakukan pemaparan proses bisnis dan perizinan KITE**			
	a. Penanggung jawab atau Direktur badan usaha dapat dihadirkan pada saat presentasi dan sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang terakhir			
	b. isi paparan dapat menggambarkan profil bisnis perusahaan secara utuh			
	c. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis KITE			
3.	**Sistem Pengendalian Internal (SPI)**			
	a. Memiliki struktur organisasi yang jelas			
	b. Badan usaha memiliki SOP yang memadai terutama berkaitan dengan barang yang akan diimpor dengan menggunakan fasilitas.			
4.	**Sudah mendayagunakan IT Inventory sesuai ketentuan**			
5.	**Jenis Usaha *(Nature Of Business)* Badan Usaha**			
	a. alur produksi dari barang dan bahan baku menjadi barang jadi			
	b. keterkaitan jenis bidang usaha perusahaan dengan barang dan bahan baku serta hasil produksi.			
6.	**Indikator kinerja utama *(key performance indicator)* yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE**			
7.	**Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Kepala Kantor Pabean**			
Informasi lainnya yang diperoleh dari paparan badan usaha:		a. b.		
Kesimpulan				
Catatan				

Nama Pejabat Penilai 1 : NIP Jabatan Tanda Tangan	
Nama Pejabat Penilai 2 : NIP Jabatan Tanda Tangan	
Nama Pejabat Penilai 3 : NIP Jabatan Tanda Tangan	
dst.	

FORMAT BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Undangan No ..... tanggal ..... dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama Perusahaan :
2. Lokasi Perusahaan :
3. NPWP :
4. Izin yang Dimohonkan : (KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian)
5. Jenis Hasil Produksi :

* tidak melakukan presentasi proses bisnis sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
** telah melakukan presentasi proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut:

berdasarkan penilaian, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT ..... **dapat disetujui/disetujui dengan perbaikan** (menyebutkan perbaikan yang harus dilakukan)/**ditolak** (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai ..... /**perlu dilakukan presentasi lanjutan** (menyebutkan pemaparan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan).

Presentasi telah selesai dilaksanakan pada tanggal ..... pukul .....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa

Perwakilan Perusahaan

....

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah/KPU, ...

....

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha ..... nomor ..... tanggal ..... diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan kepada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor ..... tanggal .....;
2. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor ..... tanggal .....;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menetapkan badan usaha ..... NPWP ..... sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor, termasuk kewajiban melunasi seluruh kewajiban pembayaran, apabila terdapat barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang memanfaatkan fasilitas KITE Pembebasan.

KETIGA : Data entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean ..... (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan ..... (perusahaan).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama badan usaha : .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
3. Nomor Induk Berusaha : .....
4. Alamat kantor : .....
5. Nomor telepon kantor : .....
6. Nomor *faximil*e kantor : .....
7. Email kantor : .....
8. Data penanggung jawab : .....

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

9. Fasilitas kepabeanan yang telah digunakan :

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

10. Asal perolehan barang dan bahan : .....
11. Tujuan penjualan hasil produksi : .....
12. Indikator kinerja utama *(key performance indicator/KPI)** :

No.	Indikator	Target
a.	PPh Badan Pasal 21	
b.	Devisa ekspor	
c.		

*Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode tahun pertama setelah badan usaha ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. Target KPI untuk periode berikutnya dicantumkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan pada laporan capaian KPI yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah/KPU setiap tahun.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN II

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (M^2)	Status kepemilikan/ penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan* :

No.	Alamat	Luas (M^2)	Status kepemilikan/ penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1. Izin Usaha Industri (IUI)
   a. Instansi penerbit IUI : .....
   b. Nomor IUI : .....
   c. Tanggal IUI : .....
   d. Bidang Usaha Industri : .....

2. Kapasitas produksi sesuai IUI :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
a.			
b.			
c.			

3. Barang dan Bahan :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Rencana impor per tahun
a.				
b.				
c.				

4. Hasil Produksi :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.					
b.					
c.					

5. Penerima subkontrak** :

No.	Nama penerima subkontrak	NPWP	Alamat	Tahapan kegiatan produksi
a.				
b.				
c.				

6. Periode KITE Pembebasan : ..... bulan

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS KITE

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU/KANTOR PABEAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas KITE

Tanggal .....

Yth. Pimpinan .....
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : ..... tanggal ..... hal permohonan fasilitas KITE, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan:

☐ hasil penelitian administrasi
☐ hasil analisa kriteria dan persyaratan
☐ hasil pemeriksaan lapangan

permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

a. .....
b. .....
c. dst.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEGIATAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIKAN DIPENUHINYA KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) YANG DAPAT DIAKSES OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SECARA DARING (*ONLINE*)

Tahap	Kegiatan
Triwulan I	1. Menyampaikan pemberitahuan pertama kepada perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (online) dan batas waktu pemenuhan kriteria daring. 2. Dalam hal IT Inventory perusahaan telah dijalankan secara online, pejabat Bea dan Cukai melakukan uji coba dan penilaian.
Triwulan II	1. Menyampaikan pemberitahuan kedua kepada perusahaan untuk Menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (*online)* dan batas waktu pemenuhan kriteria daring. 2. Mengidentifikasi kendala yang dialami perusahaan. 3. Memberikan asistensi kepada perusahaan untuk memenuhi kriteria daring *(online).*
Triwulan III	1. Memantau perkembangan IT Inventory perusahaan dan memberikan asistensi atas kendala yang dialami perusahaan. 2. Menyampaikan pemberitahuan ketiga kepada perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring *(online),* batas waktu pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi berupa pembekuan fasilitas KITE.
Triwulan IV	1. Menyampaikan pemberitahuan keempat kepada perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring *(online),* batas waktu pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi berupa pembekuan fasilitas KITE. 2. Melakukan pembekuan fasilitas KITE terhadap perusahaan yang belum memenuhi kriteria daring *(online)* pada akhir triwulan setelah melewati jatuh tempo satu tahun sejak tanggal surat keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE

FORMAT CHECKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN *IT INVENTORY*

CHECKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*)

NAMA PERUSAHAAN

No.	Kriteria	Ya / Tidak	Keterangan
I. PENCATATAN			
1.1.	Mencatat pemasukan dan pengeluaran Bahan Baku		
1.2.	Mencatat pemasukan dan pengeluaran Barang Dalam Proses (WIP)		
1.3.	Mencatat pemasukan dan pengeluaran Barang Hasil Produksi		
1.4.	Mencatat pemasukan dan pengeluaran *Scrap* / *Waste*		
1.5.	Menampilkan saldo barang		
1.6.	Memuat kolom jenis, nomor, dan tanggal dokumen kepabeanan		
1.7.	Memuat keterkaitan antara pemasukan dan pengeluaran dengan dokumen kepabeanan		
1.8.	Penggunaan kode atas barang dan bahan baku serta Barang Hasil Produksi		
II. LAPORAN			
2.1.	Menghasilkan Laporan Pemasukan Bahan Baku		
2.2.	Menghasilkan Laporan Pemakaian Bahan Baku		
2.3.	Menghasilkan Laporan Pemakaian Barang dalam Proses (WIP) dalam rangka Kegiatan Subkontrak		
2.4.	Menghasilkan Laporan Pemasukan Barang Hasil Produksi		
2.5.	Menghasilkan Laporan Pengeluaran Barang Hasil Produksi		
2.6.	Menghasilkan Laporan Mutasi Bahan Baku		
2.7.	Menghasilkan Laporan Mutasi Hasil Produksi		
2.8.	Menghasilkan Laporan Penyelesaian *Waste* / *Scrap*		
III. AKSES ONLINE DAN REALTIME DATA			
3.1.	Dapat diakses secara daring (*online*) *(web based/remote desktop/desktop application*)*		
3.2.	Menyediakan *Username* dan *Password* khusus untuk Pejabat/Pegawai DJBC		
3.3.	Menyediakan akses riwayat aktivitas (*log history*) kegiatan pengguna *IT Inventory*		
3.4.	Menyajikan data secara *realtime* atau tepat waktu (tidak lebih dari 3 hari sejak pemasukan/pemakaian/pengeluaran)		
3.5.	Menghasilkan laporan secara *realtime* sesuai data yang diinput		

IV. KESIMPULAN

Tempat dan Tanggal,
Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (*KEY PERFORMANCE INDICATOR*) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE PEMBAHASAN

KOP SURAT PERUSAHAAN KITE

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (*KEY PERFORMANCE INDICATOR*) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE PEMBAHASAN

A DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. NPWP :
3. Jenis Fasilitas : a. KITE Pembebasan
   b. KITE Pengembalian
4. Nomor SKEP awal dan perubahan terakhir :
5. Brand Produksi :
6. Jenis Investasi : Pilihan (a. PMA b. MPDN c. Lainnya (sebutkan))

B CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (*KEY PERFORMANCE INDICATOR*)

No.	Indikator	Target Periode ...	Capaian Periode ...	Target Periode ...
a.	PPh Badan Pasal 21			
b.	Devisa ekspor			
c.				

C. DAMPAK EKONOMI

1. Jumlah Tenaga Kerja :
2. Jumlah Upah Tenaga Kerja :
3. Nilai Ekuitas :
4. Nilai PMTB (pembentukan modal tetap bruto) / Penambahan Investasi :
5. Jumlah PPh Badan Tahun Pajak Terakhir :
6. Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Daerah Lainnya :
7. Jumlah Jaringan Usaha (Subkon, Distributor, Vendor, dll) yang menggunakan fasilitas :
8. Jumlah Jaringan Usaha (Subkon, Distributor, Vendor, dll) yang tidak menggunakan fasilitas :
9. Jumlah tenaga kerja pada jaringan usaha yang tidak menggunakan fasilitas :
10. CAPEX/Depresiasi :
11. Laba/rugi Usaha Sebelum Pajak :
12. Jumlah Pajak Tidak Langsung (contoh: PPN, PPnBM, bea masuk, bea keluar, pajak impor) :
13. Pajak Daerah (contoh: PBB, pajak kendaraan bermotor) :
14. Jumlah nilai Devisa Ekspor :
15. Jumlah nilai Devisa Impor :

D. PERTANYAAN UMUM

1. Apakah Fasilitas KITE Bermanfaat Bagi Perusahaan? : (Ya / Tidak, sebutkan alasan)
2. Uraian Manfaat Fasilitas KITE Bagi Perusahaan :
3. Apakah terdapat ketentuan dan prosedur saat ini yang menyulitkan dalam penerapan :

di lapangan? Sebutkan.

4. Apakah terdapat ketentuan saat ini yang tidak efektif dalam penerapan di lapangan? Sebutkan. :
5. Apakah terdapat kendala dalam pelayanan fasilitas di Kanwil DJBC/KPUBC/KPPBC (sarana prasarana/SKP/ birokrasi/SDM) :
6. Adakah masukan untuk pengembangan pemberian fasilitas ke depannya? :

Nama Perusahaan
Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT PENCATATAN DATA LAPORAN KEUANGAN, DATA MENGENAI DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE, SERTA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (*KEY PERFOMANCE INDICATOR*)

I. DATA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KITE

No.	Perusahaan KITE Pembebasan	SKEP Fasilitas KITE		Laporan Keuangan yang disampaikan			Aset Lancar		Total Aset		Utang Lancar		Total Utang		Modal		Laba/Rugi Bersih	
		Nomor	Tanggal	Audited /Tidak	KAP	Opini	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn .....

II. DATA MENGENAI DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE

No.	Perusahaan KITE Pembebasan	NPWP	SKEP Fasilitas KITE		Jenis Investasi (a. PMA b. MPDN c. Lainnya (sebutkan))	Brand Produksi	Data Dampak Ekonomi (sesuai Lampiran II Perdirjen ini, Bagian C)					
			Nomor	Tanggal			Jumlah Tenaga Keija	Jumlah Upah Tenaga Kerja	Nilai Ekuitas	Nilai PMTB / Investasi	Jumlah PPh Badan Tahun Pajak Terakhir	Dan seterusnya ...

III. DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (*KEY PERFORMANCE INDIKATOR*)

No	Perusahaan KITE Pembebasan	SKEP Fasilitas KITE		Indikator 1	Target	Capaian	Tercapai / Tidak	Indikator 2	Target	Capaian	Tercapai / Tidak	Indikator 3 dst ...	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak
		Nomor	Tanggal												
				PPh Badan Pasal 21				Devisa ekspor							

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .... TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan/pemberitahuan perubahan data oleh PT ..... nomor ..... tanggal ..... diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data dimaksud telah memenuhi persyaratan/perlu dilakukan perubahan data pada Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .... tentang Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan kepada .....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan :
1. ..... (dokumen pendukung perubahan data keputusan pemberian fasilitas KITE Pembebasan);
2. .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..... TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA .....

PERTAMA : Mengubah Lampiran ..... Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... Tanggal ..... menjadi Lampiran .... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....;

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan:
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean ..... (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan ..... (Perusahaan).

Ditetapkan di .....
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama badan usaha : .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
3. Nomor Induk Berusaha : .....
4. Alamat kantor : .....
5. Nomor telepon kantor : .....
6. Nomor *faximil*e kantor : .....
7. Email kantor : .....
8. Data penanggung jawab : .....

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

9. Fasilitas kepabeanan yang telah digunakan :

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

10. Asal perolehan barang dan bahan : .....
11. Tujuan penjualan hasil produksi : .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN II

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (M^2)	Status kepemilikan/ penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan barang dan bahan* :

No.	Alamat	Luas (M^2)	Status kepemilikan/ penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1. Izin Usaha Industri (IUI)
   a. Instansi penerbit IUI : .....
   b. Nomor IUI : .....
   c. Tanggal IUI : .....
   d. Bidang Usaha Industri : .....

2. Kapasitas produksi sesuai IUI :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
a.			
b.			
c.			

3. Barang dan Bahan :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Rencana impor per tahun
a.				
b.				
c.				

4. Hasil Produksi :

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Masa produksi	Rencana ekspor per tahun
a.					
b.					
c.					

5. Penerima subkontrak** :

No.	Nama penerima subkontrak	NPWP	Alamat	Tahapan kegiatan produksi
a.				
b.				
c.				

6. Periode KITE Pembebasan :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Tanggal .....

Yth. Pimpinan .....
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : ..... tanggal ..... hal Permohonan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung, permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

a. .....
b. .....
c.. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa .....

Untuk keterangan lebih lanjut Saudara dapat menghubungi ..... (unit) dengan nomor telepon ..... /*email* ..... (nomor telepon dan *email* resmi kantor).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT TANDA TERIMA JAMINAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU ATAU KANTOR PABEAN

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN / JAMINAN PENGGANTI*

NOMOR : ...../...../.....

Sudah terima dari ..... (Perusahaan KITE)
Keputusan pemberian fasilitas
KITE Pembebasan/NPWP : ...../.....
Alamat : .....
Nomor/Tanggal Jaminan : ...../.....
Bentuk Jaminan : .....
Nomor/tanggal**:

☐ Aju BC 2.0 : .....
☐ Aju BC 2.8 : .....
☐ Aju BC 2.5 : .....
☐ PPF.TZ : .....
☐ Dokumen Lainnya : .....

* pilih sesuai jaminan yang diserahkan
** hanya dapat disilang salah satu.

dengan keterangan sebagai berikut:

Nama dan Kode Penjamin : .....
Periode Jaminan : ..... s.d.....
Nilai Jaminan : Rp .....
.....

....., ...
yang menyerahkan, yang menerima,

....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : ..... Tanggal .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....
di .....

Dengan ini diberitahukan bahwa kami:

Nama Perusahaan : .....
SKEP KITE Pembebasan : .....

mengajukan permohonan untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, yaitu :

1. Lokasi Gudang/ ..... : .....
2. Alamat : .....
3. Jenis barang yang ditimbun : .....
4. Jumlah barang : .....
5. *Packing List* : .....
6. Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau Penimbunan : .....

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab
Perusahaan/Direksi

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : ..... Tanggal .....
Lampiran : .....
Hal : Pemberitahuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....
di .....

Dengan ini diberitahukan bahwa kami:

Nama Perusahaan : .....
SKEP KITE Pembebasan : .....

akan melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, yaitu :

1. Lokasi Gudang/ ..... : .....
2. Alamat : .....
3. Jenis barang yang ditimbun : .....
4. Jumlah barang : .....
5. *Packing List* : .....
6. Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau Penimbunan : .....

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab
Perusahaan/Direksi

.....

Tembusan:
1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU;
2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : ..... Tanggal .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Persetujuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
SKEP KITE Pembebasan Nomor .....
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ..... tanggal ..... hal ..... dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dilokasi:
   a. Lokasi Gudang/.... : .....
   b. Alamat : .....
   c. Jenis barang yang ditimbun : .....
   d. Jumlah barang : .....
   e. *Packing List* : .....
   f. Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau penimbunan : .....

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penimbunan;
   b. Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atau berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....

Tembusan:
1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUNGGAHAN (*LOADING*) KONVERSI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : ..... Tanggal .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan Pengunggahan (*Loading*) Konversi a.n. Nama Perusahaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....
di .....

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : .....
SKEP KITE Pembebasan : .....

mengajukan permohonan untuk dilakukan pengunggahan (*Loading*) Konversi sebagaimana terlampir pada surat ini ke dalam Sistem Komputer Pelayanan fasilitas KITE Pembebasan.

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab
Perusahaan/Direksi

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KONVERSI

NAMA PERUSAHAAN .....(1).....
SKEP KITE PEMBEBASAN .....(2).....

NOMOR KONVERSI	DATA HASIL PRODUKSI			KOEFISIEN				BARANG DAN BAHAN TERPAKAI	
	NO.	KODE HASIL PRODUKSI	SAT	NO	KODE BARANG DAN BAHAN	SAT	KOEFISIEN	TERKANDUNG	*WASTE/ SCRAP*
		HS			HS			(%)	(%)
		URAIAN BARANG			URAIAN BARANG				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	1			1					
				2					
				3					

Tanggal:

Materai

Diotorisasi oleh :

Pimpinan Perusahaan

PETUNJUK PENGISIAN KONVERSI

1. Diisi dengan nama Perusahaan KITE Pembebasan.
2. Diisi dengan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
3. Diisi dengan nomor Konversi.
4. Diisi dengan nomor urut Hasil Produksi.
5. Diisi dengan kode Hasil Produksi, klasifikasi HS, dan uraian barang.
6. Diisi dengan satuan Hasil Produksi.
7. Diisi dengan nomor urut Barang dan Bahan.
8. Diisi dengan kode Barang dan Bahan, klasifikasi HS, dan uraian barang.
9. Diisi dengan satuan dari koefisien Barang dan Bahan.
10. Diisi dengan koefisien Barang dan Bahan.
11. Diisi dengan angka persentase Barang dan Bahan yang digunakan untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi.
12. Diisi dengan angka persentase *waste/serap* dalam Barang dan Bahan yang digunakan untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi.

CONTOH PENYUSUNAN KONVERSI

Jika untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi diproduksi dengan menggunakan Barang dan Bahan asal Impor dengan fasilitas KITE Pembebasan, barang dan bahan asal Impor tanpa fasilitas KITE Pembebasan (Impor Umum) dan barang dan bahan asal tempat lain dalam daerah pabean, dengan Konversi produksi sesuai contoh berikut:

DATA HASIL PRODUKSI			KONVERSI				BAHAN BAKU TERPAKAI		
NO.	Kode HP / URAIAN BARANG	SAT	NO.	Kode BB / URAIAN BARANG	SAT	KOEFISIEN	TERKANDUNG (%)	WASTE /SCRAP (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	KET. ASAL BAHAN BAKU:
1	7100 0 576		1	ZC100					***Fasilitas Pembebasan***
	MANGANESE DIOXIDE BATTERIES : 1215BP4	PCE		ZINC CALLOT	KGM	0,025	90%	10%	
			2	AC001					Lokal
				ACETYLENE BLACK	KGM	0,030	90%	10%	
			3	MO10					Impor Umum (PIB)
				MANGANESE ORE	KGM	0,025	90%	10%	
			4	EM100					Impor Umum (PIB)
				ELECTROLITIC MA	KGM	0,050	90%	10%	
			5	PL001					***Fasilitas Pembebasan***
				PAPER LINER	MTR	0,20	90%	10%	
			6	CRP001					Lokal
				CARIPHALT	KGM	0,10	90%	10%	
			7	TP01					Lokal
				TIN PLATE	KGM	0,10	90%	10%	

maka Konversi untuk Barang dan Bahan asal fasilitas KITE Pembebasan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

KODE KONVERSI	DATA HASIL PRODUKSI			KONVERSI				BAHAN BAKU TERPAKAI	
	NO.	Kode HP / HS / URAIAN BARANG	SAT	NO.	Kode BB / HS / URAIAN BARANG	SAT	KOEFISIEN	TERKANDUNG (%)	WASTE/ SCRAP (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BGS 2	1	7 100 0 576/002		1	ZC100				
		8506.10.90.00			7907.00.90.10				
		MANGANESE DIOXIDE BATTERIES : 1215BP4	PCE		ZINC CALLOT	KGM	0,025	90%	10%
				2	PL001				
					4811.90.90.00				
					PAPER LINER	MTR	0,20	90%	io%

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN SELURUH KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan ijin mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....
di .....

Kami ..... (nama Perusahaan), Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan Nomor ..... Tanggal ..... dengan ini mengajukan permohonan ijin mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat kami kerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:

a.	Penerima subkontrak	:	.....
b.	Alamat penerima subkontrak	:	.....
c.	NPWP penerima subkontrak	:	.....
d.	Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses	:	.....
e.	Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses	:	.....
f.	Jenis hasil produksi	:	.....
g.	Jumlah dan satuan hasil produksi	:	.....

Demikian kami sampaikan.

Materai
6000

Penanggung Jawab/Direksi
Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKONTRAKKAN SELURUH KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : ..... Tanggal .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Persetujuan mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan

Yth. Pimpinan Perusahaan
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ..... tanggal ..... hal ..... dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan ..... (nama Perusahaan) untuk mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:
   a. Penerima subkontrak : .....
   b. Alamat penerima subkontrak : .....
   c. NPWP penerima subkontrak : .....
   d. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses : .....
   e. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses : .....
   f. Jenis hasil produksi : .....
   g. Jumlah dan satuan hasil produksi : .....

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pembebasan;
   b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan; dan
   c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....

Tembusan:
1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean.

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT PERMOHONAN MENSUBTRAKTORKKAN KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan mensubkontrakkan kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....
di .....

Kami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nomor: ..... Tanggal: ..... dengan ini mengajukan permohonan ijin mensubkontrakkan kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dengan data sebagai berikut:

a. Penerima subkontrak : .....
b. Alamat penerima subkontrak : .....
c. NPWP penerima subkontrak : .....
d. Nomor Izin Usaha Industri / Dokumen Sejenisnya : .....
e. Nomor dan Tanggal Kontrak / Perjanjian Subkontrak : .....
f. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses : .....
g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses : .....
h. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan : .....
i. Jenis hasil produksi : .....
j. Jumlah dan satuan hasil produksi : .....

Demikian kami sampaikan.

Materai
6000

Penanggung Jawab/Direksi
Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT PEMBERITAHUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Pemberitahuan mensubkontrakkan kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....
di .....

Kami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nomor: ..... Tanggal: ....., dengan ini memberitahukan bahwa Perusahaan akan mensubkontrakkan kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dengan data sebagai berikut:

a. Penerima subkontrak : .....
b. Alamat penerima subkontrak : .....
c. NPWP penerima subkontrak : .....
d. Nomor Izin Usaha Industri/Dokumen Sejenisnya : .....
e. Nomor dan Tanggal Kontrak/Perjanjian Subkontrak : .....
f. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses : .....
g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses : .....
h. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan : .....
i. Jenis hasil produksi : .....
j. Jumlah dan satuan hasil produksi : .....

Demikian kami sampaikan.

Materai 6000

Penanggung Jawab/Direksi
Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBTRAKTORKKAN KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : ..... Tanggal .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Persetujuan mensubkontrakkan kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan Perusahaan
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... perihal ....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. **Dapat disetujui** permohonan ..... (Perusahaan) untuk mensubkontrakkan kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang dengan data sebagai berikut:
   a. Penerima subkontrak : .....
   b. Alamat penerima subkontrak : .....
   c. NPWP penerima subkontrak : .....
   d. Nomor Izin Usaha Industri/Dokumen Sejenisnya : .....
   e. Nomor dan Tanggal Kontrak/Perjanjian Subkontrak : .....
   f. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses : .....
   g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses : .....
   h. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan : .....
   i. Jenis hasil produksi : .....
   j. Jumlah dan satuan hasil produksi : .....

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan;
   b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan; dan
   c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Kepala Kantor

.....

Tembusan:
1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU;
2. Kepala Kantor Pabean.

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan melakukan subkontrak pada penerima subkontrak di luar daerah pabean

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....
di .....

Kami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nomor: ..... Tanggal: ....., dengan ini mengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak pada penerima subkontrak di luar daerah pabean dengan data sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan juga:

1. paparan mengenai alur proses produksi dan alasan perlunya dilakukan kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean:
2. paparan mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh penerima subkontrak di luar daerah pabean:
3. paparan mengenai hal yang akan dapat membuktikan bahwa barang yang nantinya diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan
4. daftar perkiraan bagian-bagian (*parts*) pengganti atau ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal terdapat penggantian, penambahan, atau biaya-biaya dimaksud.

Demikian kami sampaikan.

Materai 6000	Penanggung Jawab/Direksi Jabatan .....

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA BARANG YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN KEPADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

No. Urut	Uraian Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang/FOB	Tujuan ekspor	Negara Tujuan ekspor	Perkiraan periode pengerjaan subkontrak	Pemberitahuan Pabean Barang dan/atau Bahan		
								Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal

Penanggung Jawab/Direksi

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUBKONTRAK KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : ..... Tanggal .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Persetujuan subkontrak kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak di luar daerah pabean

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan KITE Pembebasan)
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal ..... **disetujui** permohonan Saudara untuk melakukan subkontrak kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak di luar daerah pabean dengan data sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

.....

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA BARANG YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN KEPADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

No. Urut	Uraian Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang/FOB	Tujuan ekspor	Negara Tujuan ekspor	Perkiraan periode pengerjaan subkontrak	Pemberitahuan Pabean Barang dan/atau Bahan		
								Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal

Kepala Kantor

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan

Tanggal .....

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....
di .....

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:
Nama Perusahaan : .....
NPWP : .....
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE : .....
Alamat : .....
Telepon/*Faximile* : .....

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Periode KITE Pembebasan selama ..... bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/... (lainnya) ... nomor .... tanggal .... * karena alasan .....

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:
☐ Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan
☐ Bukti pendukung berupa:
1. .....;
2. .....

materai Rp.6000,00

Pemohon
(Penanggung Jawab Perusahaan)

Nama : .....
Jabatan : .....

* dalam hal tidak mencukupi, dapat dibuat lembar lampiran

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan

Tanggal .....

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal ....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan Periode KITE Pembebasan terhadap BC.2.0/BC2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/... (lainnya) ... nomor .... tanggal .... karena alasan ..... selama ..... bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan, **dapat disetujui.**

2. Persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Perusahaan KITE harus melakukan penggantian jaminan;
   b. penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan ini;
   c. dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, surat persetujuan ini dinyatakan batal demi hukum.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan

Tanggal .....

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal ....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan Periode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/... (lainnya) ... nomor .... tanggal .... karena alasan ..... selama ..... bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan, **tidak disetujui**, karena .....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Kembali Periode KITE Pembebasan

Tanggal .....

Yth. Direktur Fasilitas Kepabeanan
c.q. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:
Nama Perusahaan : .....
NPWP : .....
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE : .....
Alamat : .....
Telepon/*Faximile* : .....

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan kembali Periode KITE Pembebasan selama ..... bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/... (lainnya) ... nomor .... tanggal .... * karena alasan .....

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

☐ Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan
☐ Bukti pendukung berupa:
1. .....;
2. .....

materai Rp.6000,00

Pemohon
(Penanggung Jawab Perusahaan)

Nama : .....
Jabatan : .....

* dalam hal tidak mencukupi, dapat dibuat lembar lampiran

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi terkait Permohonan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan

Tanggal .....

Yth. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di .....

Sehubungan dengan surat ....(Nama Perusahaan) Nomor ..... tanggal ..... perihal ....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan kembali Periode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/... (lainnya) ... nomor .... tanggal .... karena alasan..... selama ..... bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan.

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat kami sampaikan bahwa:
   a.
   b.
   c.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan permohonan ....(Nama Perusahaan) untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan.

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Perpanjangan Kembali Periode KITE Pembebasan

Tanggal .....

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal ....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan kembali Periode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... tanggal.... karena alasan ..... selama ..... bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan, **dapat disetujui.**

2. Persetujuan perpanjangan kembali periode KITE Pembebasan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Perusahaan KITE harus melakukan penggantian jaminan;
   b. penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan ini;
   c. dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, surat persetujuan ini dinyatakan batal demi hukum.

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur
Fasilitas Kepabeanan,

.....

Tembusan : Kepala Kantor Wiliayah/KPU .....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan Perpanjangan Kembali Periode KITE Pembebasan

Tanggal .....

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal ....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan kembali Periode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ.01/ ... (lainnya) ... nomor .... tanggal .... karena alasan ..... selama ..... bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan, **tidak disetujui**, karena .....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Fasilitas Kepabeanan,

.....

Tembusan : Kepala Kantor Wiliayah/KPU .....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN KARENA KEADAAN TERTENTU

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /..... / .....

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE PEMBEBASAN KEPADA ..... KARENA KEADAAN TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dipandang perlu memberikan Pembebasan dari Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Administrasi Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat Fasilitas KITE Pembebasan Kepada ..... Karena Keadaan Tertentu;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

Memperhatikan :
1 ..... (dokumen pendukung);
2 .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE PEMBEBASAN KEPADA ..... KARENA KEADAAN TERTENTU.

PERTAMA : Memberikan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Administrasi Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat Fasilitas KITE Pembebasan Karena Keadaan Tertentu, kepada:

Nama Perusahaan	:	.....
NPWP	:	.....
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE	:	No ..... Tgl .....
Alamat	:	.....

KEDUA : Daftar barang yang mendapatkan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Administrasi Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat Fasilitas KITE Pembebasan Karena Keadaan Tertentu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Barang dan Bahan, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau penerima subkontrak);
7. Pimpinan ..... (Nama Perusahaan).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE PEMBEBASAN KEPADA ..... KARENA KEADAAN TERTENTU

NO	**KODE KANTOR**	**URAIAN BARANG**	**JUMLAH**
		KODE HS	
	NOPEN/TGL PIB	**SERI BARANG**	**SATUAN**

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)

NAMA PERUSAHAAN .....(1).....
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN .....(2).....
PENGAJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU .....(3).....
JENIS PENYELESAIAN .....(4).....
NOMOR PENGAJUAN .....(5).....

PENYELESAIAN							PEMAKAIAN BARANG DAN BAHAN							
		DATA DOKUMEN PENYELESAIAN			DATA PENUNJANG									
NO	KODE JENIS DOKUMEN	- KODE KANTOR - NOPEN - TGL	- KODE HASIL PRODUKSI BERIKUT NOMOR KONVERSI ATAU KODE BARANG - HS - URAIAN BARANG - NILAI (Rp)	- JUMLAH - SATUAN	NO. & TANGGAL - LPE - BUKTI EKSPOR	- JUMLAH - SATUAN - NILAI (Rp)	NO	KODE JENIS DOKUMEN	- KODE KANTOR - NOPEN - TGL	NOMOR URUT SERI BARANG	- KODE BARANG DAN BAHAN - HS - URAIAN BARANG	- JUMLAH - SATUAN	NILAI CIF (Rp)	- BEA MASUK - CUKAI - PPN - PPnBM
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Total Nilai Penyelesaian:

Total Nilai CIF :
Total Nilai BM :
Total Nilai CUKAI :
Total Nilai PPN :
Total Nilai PPnBM :

Pembuat : TTd. :

Pemeriksa : TTd. :

.... (nama Kota) .... (tgl/bln/thn).....

Diketahui.

Pimpinan Perusahaan

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)

1. Diisi dengan nama Perusahaan.
2. Diisi dengan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
3. Diisi dengan tujuan pengajuan laporan, yaitu Kantor Wilayah/KPU yang menerbitkan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
4. Diisi dengan pilihan jenis penyelesaian Barang dan Bahan, yaitu:
   a. angka "1" untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi;
   b. angka "7", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk sisa proses produksi (waste/scrap);
   c. angka "8", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi Rusak yang dimusnahkan;
   d. angka "9", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi Rusak yang dirusakkan;
   e. angka "10", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk barang dalam proses rusak yang dimusnahkan;
   f. angka "11", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk barang dalam proses rusak yang dirusakkan;
   g. angka "12", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan Bahan Rusak yang dimusnahkan;
   h. angka "13", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan Bahan Rusak yang dirusakkan;
   i. angka "14", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan Bahan Rusak yang diekspor kembali;
   j. angka "15", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan Bahan Rusak yang dikembalikan ke TPB;
   k. angka "16", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang diekspor kembali;
   l. angka "17", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang dikembalikan ke TPB.
5. Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 01.
6. Diisi dengan nomor urut penyelesaian Barang dan Bahan.
7. Diisi dengan pilihan kode jenis dokumen penyelesaian, yaitu:
   a. angka "1" untuk jenis dokumen BC 3.0;
   b. angka "2" untuk jenis dokumen BC 3.3;
   c. angka "3" untuk jenis dokumen BC 2.4.
8. Diisi dengan kode kantor, nomor pendaftaran, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian sebagaimana angka 7.
9. Diisi dengan:
   a. kode barang, berupa:
      1) kode Hasil Produksi yang meliputi nomor Konversi yang digunakan, untuk jenis penyelesaian Hasil Produksi yang diekspor; atau
      2) kode barang, untuk jenis penyelesaian selain Hasil Produksi yang diekspor;
   b. klasifikasi HS barang;
   c. uraian barang; dan
   d. nilai (dalam Rupiah).

10 Diisi dengan jumlah dan satuan barang.

11 Diisi dengan nomor dan tanggal bukti realisasi ekspor atau penyelesaian, berupa:
   a. laporan hasil penelitian realisasi ekspor;
   b. berita acara;
   c. bukti pembayaran;
   d. faktur penjualan/invoice;
   e. Surat Serah Terima Barang;
   f. bukti piutang;
   g. lain-lain.

12 Diisi dengan jumlah, satuan dan nilai barang berdasarkan bukti realisasi ekspor atau penyelesaian sebagaimana angka 11.

13 Diisi dengan nomor urut Barang dan Bahan yang dilaporkan.

14 Diisi dengan pilihan kode jenis dokumen pemberitahuan pabean impor, yaitu:
   a. angka "1" untuk jenis dokumen BC 2.0;
   b. angka "2" untuk jenis dokumen BC 2.5;
   c. angka "3" untuk jenis dokumen BC 2.8;
   d. angka "4", untuk dokumen lainnya.

15 Diisi dengan kode kantor, nomor pendaftaran, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana angka 14.

16 Diisi dengan nomor urut seri Barang dan Bahan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana angka 14.

17 Diisi dengan:
   a. kode Barang dan Bahan;
   b. klasifikasi HS Barang dan Bahan; dan
   c. uraian Barang dan Bahan.

18 Diisi dengan jumlah dan satuan Barang dan Bahan.

19 Diisi dengan nilai CEIF Barang dan Bahan.

20 Diisi dengan nilai bea masuk, cukai, PPN, dan PPnBM Barang dan Bahan.

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT REGISTER

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

TANDA TERIMA REGISTER BCL.KT 01

Telah diterima hasil register BCL.KT 01:

No. Aju :
Nama :
Keputusan penetapan sebagai
Perusahaan KITE :
No. Register :
Tgl. Register :
Jml Dok Penyelesaian :
Jml Dok Barang dan Bahan :
Jumlah Hasil Produksi :
Jumlah Barang dan Bahan :

....., ...
yang menyerahkan,

.....

yang menerima,

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE)
Nomor : .....(1)..... Tanggal : .....(2).....

A. KPU BC/KANWIL BC : .....(3).....
B. DATA EKSPORTIR :

EKSPORTIR a. NPWP : .....(4)..... b. NIPER/SKEP : .....(5)..... c. Nama : .....(6)..... d. Alamat : .....(7).....	Nomor PEB : .....(12)..... Tanggal : .....(13)..... FASILITAS YANG DITERIMA .....(14)..... Pelabuhan Muat Asal : .....(15)..... Pelabuhan Muat Ekspor : .....(16)..... Pelabuhan Tujuan : .....(17).....
PENERIMA a. Nama : .....(8)..... b. Alamat : .....(9)..... c. Negara : .....(10).....	Packing List : .....(18)..... Invoice : .....(19).....
URAIAN BARANG .....(11).....	Valuta asing : .....(20)..... Nilai FOB : .....(21).....

C. KESIMPULAN :
.....(22).....

D. CATATAN
.....(23).....

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE)

(1) Nomor LHPRE.

(2) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) LHPRE.

(3) Nama Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan surat keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan.

(4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB.

(5) NIPER atau nomor surat keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.

(6) Nama eksportir sesuai dengan nama yang tercantum dalam PEB.

(7) Alamat eksportir sesuai dengan nama alamat yang tercantum dalam PEB.

(8) Nama penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang tercantum dalam PEB.

(9) Alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan alamat penerima yang tercantum dalam PEB.

(10) Negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercantum dalam PEB.

(11) Uraian barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PEB.

(12) Nomor pendaftaran PEB sesuai dengan nomor perdaftaran yang tercantum dalam PEB.

(13) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.

(14) Fasilitas yang diterima oleh eksportir, yaitu fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas barang impor yang ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain.

(15) Nama pelabuhan muat asal barang ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat asal yang tercantum dalam PEB.

(16) Nama pelabuhan muat ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat ekspor yang tercantum dalam PEB.

(17) Nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean.

(18) Nomor packing list sesuai yang tercantum dalam PEB.

(19) Nomor invoice sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.

(20) Jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan pembeli dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB.

(21) Nilai total barang ekspor dengan Incoterm FOB, sesuai nilai FOB yang tercantum dalam PEB.

(22) Hasil rekonsiliasi diisi dengan sesuai atau tidak sesuai.

(23) Jika ada catatan dari Kantor Wilayah atau KPU dalam hal dilakukan penelitian realisasi ekspor untuk dokumen yang tidak rekon.

TATA CARA PENELITIAN REALISASI EKSPOR UNTUK DOKUMEN YANG TIDAK REKON

1. Sistem Komputer Pelayanan melakukan rekonsiliasi data dokumen pabean ekspor dengan data Outward Manifest dengan mencocokkan elemen data berupa nomor pendaftaran dan tanggal PEB.

2. Dalam hal nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pabean ekspor kedapatan sesuai dengan data Outward Manifest, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE).

3. Dalam hal hasil rekonsiliasi antara PEB dan *outward manifest* kedapatan tidak sesuai, maka 7 (tujuh) hari sejak tanggal perkiraan ekspor, SKP akan memberitahukan ketidaksesuaian melalui Notifikasi Tidak Rekon (NTR).

4. Paling lama sebelum periode KITE Pembebasan berkahir, Perusahaan KITE Pengembalian menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah dokumen:
   a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
   b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan;
   c. *Invoice;*
   d. *Packing list;*
   e. *House B/L* atau AWB

5. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah yang menerbitkan surat keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan meneliti dokumen pendukung yang diserahkan atau diunggah oleh perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan dengan cara sebagai berikut:
   a. Memeriksa kesesuaian data *shipper* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice, packing list* dan *house B/L* atau AWB.
   b. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *invoice* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice,*
   c. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *packing list* pada dokumen PEB dengan data pada *dokumen packing list.*
   d. Memeriksa kesesuaian nilai FOB pada dokumen PEB dengan data pada *dokumen invoice.*
   e. Memeriksa kesesuaian data uraian, jumlah dan jenis satuan barang pada dokumen PEB dengan data pada dokumen invoice dan *packing list*
   f. Membandingkan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen PEB dengan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen *packing list* dan *house B/L* atau AWB.

6. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan f kedapatan sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE) melalui SKP.

7. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan e kedapatan sesuai tetapi pada butir 3 huruf f kedapatan tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE) dengan memberikan catatan atas ketidaksesuaian butir 3 huruf f melalui SKP.

8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan e terdapat hasil penelitian yang tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan penolakan melalui SKP dan tidak diterbitkan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE).

9. Dalam hal dokumen disampaikan oleh Perusahaan KITE Pembebasan melewati periode pembebasan, maka Sistem Komputer Pelayanan memberikan respon penolakan.

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN BCL.KT 01

Nomor Pengajuan :
Waktu respon :

Yth. ..... (Nama Perusahaan)
..... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Dengan ini diberitahukan bahwa :

BCL.KT 01 yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1.
2. .....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PEMBERITAHUAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PEMBERITAHUAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN

Nomor Pengajuan :
Nomor Register :
Waktu respon :

Yth. ..... (Nama Perusahaan)
..... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Dengan ini diberitahukan bahwa :

BCL.KT 01 yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, karena belum menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut : .....

Agar Saudara menyampaikan kelengkapan dokumen dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan ini. Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu tersebut, laporan pertanggungjawaban ditolak.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

NAMA
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KONFIRMASI MENGENAI SELISIH ANTARA
JUMLAH PEMAKAIAN BARANG DAN BAHAN YANG DILAPORKAN PADA BCL.KT 01
DENGAN JUMLAH PEMAKAIAN BARANG DAN BAHAN BERDASARKAN KONVERSI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

KONFIRMASI SELISIH KONVERSI
NOMOR :
TANGGAL :

Yth. ..... (Nama Perusahaan)
..... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE Pembebasan (BCL.KT 01) dengan Nomor Pengajuan : ..... Nomor Register : ....., dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Terdapat selisih antara jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang dilaporkan pada BCL.KT 01 dengan jumlah pemakaian Barang dan Bahan berdasarkan Konversi sebagaimana data terlampir.

2. Berdasarkan data selisih tersebut, dengan ini kami meminta konfirmasi/penjelasan kepada Saudara mengenai penyebab terjadinya selisih dimaksud.

3. Agar jawaban konfirmasi/penjelasan Saudara sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai dengan bukti pendukung berupa:
   a. .....
   b. .....
   c. .....

4. Jawaban konfirmasi/penjelasan serta bukti pendukung sebagaimana dimaksud disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi ini.

5. Dalam hal konfirmasi/penjelasan serta bukti pendukung tidak disampaikan dalam batas waktu tersebut, atas selisih sebagaimana angka 1 dilakukan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....

DAFTAR SELISIH KONVERSI

No.	Nopen PIB Tgl PIB Kode Kantor	Seri	Uraian barang/ Kode Barang dan Bahan	Kode Satuan	BCL.KT 01	Konversi	%	BCL.KT 01	Konversi
								BM/PPN	BM/PPN
TOTAL									

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERSETUJUAN ATAS BCL.KT 01

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PERSETUJUAN ATAS BCL.KT 01
NOMOR :
TANGGAL :

Yth. ..... (Nama Perusahaan)
..... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE Pembebasan (BCL.KT 01) dengan Nomor Pengajuan: ..... Nomor Register: ..... dengan ini kami sampaikan bahwa BCL.KT 01 tersebut disetujui dan dilakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Tanggal .....

Yth. .....

Berdasarkan BCL.KT 01 dengan register nomor ..... tanggal ..... dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang telah diperhitungkan seperti pada Lampiran-1;
2. Daftar Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara Yang Disetujui Per nomor dokumen pemberitahuan pabean impor/pemasukan seperti pada Lampiran-2;
3. Daftar Jaminan yang disesuaikan/dikembalikan berdasar butir 1 seperti pada Lampiran-3.

Saldo nilai Pungutan Negara pada lampiran-2 dalam kolom 7 (saldo akhir) agar segera direalisasi ekspornya. Sedangkan nilai jaminan yang harus dijaminkan tertera pada lampiran-3 kolom 7.

Terdapat selisih konversi atas Barang dan Bahan sebagaimana Lampiran-4, yang akan dilakukan penetapan tagihan bea masuk, PPN, serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan.

Terdapat tagihan bea masuk dan PPN atas Barang dan Bahan sebagaimana Lampiran-5, yang akan diakumulasi dan dilakukan penetapan tagihan bea masuk, PPN, serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan, pada akhir periode tahun berjalan.

Bila kemudian hari hasil pemeriksaan lapangan ternyata terbukti nilai Pungutan Negara yang dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya, maka Saudara wajib melunasi kelebihan tersebut ditambah sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan serta sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

....., ...
Nama Jabatan

.....

LAMPIRAN I SPPJ NOMOR ..... TANGGAL .....

NAMA PERUSAHAAN :
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
NO/TGL REGISTER :

Daftar BC 3.0/BC 2.4 yang Disetujui

No.	Dokumen	Kantor	Nomor	Tanggal	Flag

LAMPIRAN II SPPJ NOMOR ..... TANGGAL .....

NAMA PERUSAHAAN :
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
NO/TGL REGISTER :

Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara Yang Disetujui Per nomor dokumen
pemberitahuan pabean Impor/pemasukan

No.	No. Aju PIB Nopen PIB/Tgl Seri Barang/HS Code/Kode Satuan Uraian Barang	BM awal BM saldo BM pakai BM akhir	BMT awal BMT saldo BMT pakai BMT akhir	PPN awal PPN saldo PPN pakai PPN akhir	PPnBM awal PPnBM saldo PPnBM pakai PPnBM akhir	Cukai awal Cukai saldo Cukai pakai Cukai akhir	Total awal Total saldo Total pakai Total akhir
TOTAL PER PIB: (Nilai awal) (Saldo lalu) (Digunakan) (Saldo akhir)							
TOTAL SELURUH PIB: (Nilai awal) (Saldo lalu) (Digunakan) (Saldo akhir)							

LAMPIRAN III SPPJ NOMOR ..... TANGGAL .....

NAMA PERUSAHAAN :
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
NO/TGL REGISTER :
KANTOR PABEAN IMPOR :

Daftar Jaminan yang disesuaikan/dikembalikan

No.	Penjamin No. Jaminan Periode Jaminan No. Aju PIB No. Daftar PIB Tgl. PIB	Jenis Jaminan	Nilai Jaminan Nilai Pungutan (PIB) Ket Jaminan*	Saldo lalu BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah	Digunakan BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah	Yang Harus Dijamin BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah
TOTAL						

*KETERANGAN JAMINAN:
(1). Jaminan 14 hari akan jatuh tempo
(2). Jaminan sudah jatuh tempo
(4). Jaminan tidak ada
(5). Ada jaminan tambahan
(6).

LAMPIRAN IV SPPJ NOMOR ..... TANGGAL .....

NAMA PERUSAHAAN :
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
NO/TGL REGISTER :
KANTOR PABEAN IMPOR :

Daftar Selisih Konversi

No.	**Nopen PIB Tgl PIB Kode Kantor**	**Seri**	**Uraian barang/ Kode Barang dan Bahan**	**Kode Satuan**	**BCL.KT 01**	**Konversi**	**%**	**BCL.KT 01**	**Konversi**
								BM/PPN	**BM/PPN**
TOTAL									

LAMPIRAN V SPPJ NOMOR ..... TANGGAL .....

NAMA PERUSAHAAN :
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
NO/TGL REGISTER :
KANTOR PABEAN IMPOR :

Tagihan bea masuk dan PPN atas Barang dan Bahan yang akan diakumulasi dan dilakukan penetapan pada akhir periode tahun berjalan

No.	**Nopen PIB Tgl PIB Kode Kantor**	**Seri**	**Uraian barang/ Kode Barang dan Bahan**	**Kode Satuan**	**Jumlah barang**	**TAGIHAN**			
						BM	**PPN**	**Denda BM**	**Bunga PPN**
TOTAL									

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TKNTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS BCL.KT 01

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PENOLAKAN ATAS BCL.KT 01
NOMOR :
TANGGAL :

Yth. ..... (Nama Perusahaan)
..... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE Pembebasan (BCL.KT 01) dengan Nomor Pengajuan : ....., Nomor Register : ....., dengan ini kami sampaikan bahwa BCL.KT 01 tersebut ditolak.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi

Tanggal .....

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal ..... dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan impor kembali Hasil Produksi dengan data sebagaimana terlampir, **disetujui** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Atas impor kembali Hasil Produksi:
   - ☐ diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dengan menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
   - ☐ diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

2. Pada saat impor kembali Hasil Produksi, agar Saudara:
   - ☐ a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor:
     b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
     c. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
     d. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini; dan
     e. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
   - ☐ a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor:
     b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
     c. mencantumkan nomor dan tangal surat persetujuan impor kembali ini pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
     d. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor:
     e. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini;
     f. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali

3. Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

.....

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

Hasil Produksi yang akan Diimpor Kembali							Barang dan/atau Bahan							
No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Jenis Barang Hasil Produksi	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Jenis Barang dan Bahan	Satuan	Jumlah	Nilai CIF	Bea Masuk / PPN

Nama Jabatan

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan atas Permohonan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi

Tanggal .....

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)

Yth. ..... (Nama Perusahaan)
di .....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : ..... tanggal ..... hal ....., bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung, permohonan Saudara tidak dapat disetujui dengan alasan :

a. .....
b. .....
c. dst.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

NAMA PERUSAHAAN .....(1).....
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN .....(2).....
PENGAJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU .....(3).....
NOMOR PENGAJUAN .....(4).....

Hasil Produksi yang Diimpor Kembali					Data Impor Kembali						Ekspor Kembali Hasil Produksi				
No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Barang/ Satuan/Jumlah	Nilai Barang /FOB	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Barang/ Satuan/Jumlah	Nilai CIF	Bea Masuk/ PPN/ PPh	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Barang/ Satuan/Jumlah	Nilai Barang /FOB

Pembuat : TTd:
Pemeriksa : TTd:

....(nama Kota)..... .....(tgl/bln/thn)....
Diketahui,
Penanggung Jawab / Direksi

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XL
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI
YANG DIIMPOR KEMBALI
NOMOR :
TANGGAL :

Yth. ..... (Nama Perusahaan)
..... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor kembali dengan Nomor Pengajuan : ....., Nomor Register : ....., dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut disetujui dengan daftar realisasi ekspor yang disetujui sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....

DAFTAR REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DISETUJUI LAPORANNYA

No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal/Kd Kantor	DILAPORKAN Uraian Barang / Satuan / Jumlah	DISETUJUI Uraian Barang / Satuan / Jumlah

Kepala Kantor

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XLI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI
NOMOR :
TANGGAL :

Yth. ..... (Nama Perusahaan)
..... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor kembali dengan Nomor Pengajuan : ....., Nomor Register : ....., dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut ditolak.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XLII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR ATAU PEMASUKAN BARANG CONTOH

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Impor Barang Contoh

Tanggal .....

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal ....., **disetujui** permohonan Saudara untuk melakukan impor Barang Contoh dengan mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, yaitu terhadap barang sebagai berikut:

No.	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Negara Asal	Uraian jenis Hasil Produksi yang terkait Barang Contoh	Keterangan

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

Penatausahaan atas penggunaan Barang Contoh

No.	Dokumen Pabean				Kode Barang	No. Seri Barang	HS	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Mata Uang	Harga Satuan	CIF	Bea Masuk	PPN
	Jenis Dokumen	Kode Kantor	Nomor	Tanggal											

Bukti Penerimaan Barang		Gudang
Nomor	Tanggal	

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PEMBEKUAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : S- ..... Tanggal .....
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pembekuan Fasilitas KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan ..... (Nama Perusahaan)
di .....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal ..... Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ..... (Perusahaan), yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE No. ..... Tanggal ....., telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan fasilitas KITE Pembebasan yaitu :
   a. .....
   b. .....

2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat ..... (Perusahaan) telah memenuhi kriteria pembekuan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ..... fasilitas KITE Pembebasan ..... (Perusahaan dibekukan.

3. Dengan pembekuan ini, ... (Perusahaan) tidak dapat memperoleh fasilitas KITE Pembebasan atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan serta Barang Contoh, sampai dengan fasilitas KITE Pembebasan diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor Wilayah / KPU

.....

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean ..... (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak).

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XLV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI FASILITAS KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : S- ..... Tanggal .....
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan ..... (Nama Perusahaan)
di .....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal ..... Peraturan Menter Keuangan Nomor ..... tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ..... (Perusahaan), yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE No ..... Tanggal ....., telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan yaitu:
   a. .....
   b. .....

2. Berdasarkan hal tersebut di atas maka terhitung tanggal ..... fasilitas KITE Pembebasan ..... (Perusahaan) diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor Wilayah / KPU

.....

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean ..... (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak).

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-4/BC/20I9
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..... (Diisi nomor keputusan awal dan perusahaan terakhir)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap ..... (Perusahaan) yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan bedasarkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Nomor ..... Tanggal ..... diperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan :
1. .....
2. .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..... (Diisi nomor keputusan awal dan perusahaan terakhir).

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor .... (Diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).

KEDUA : (Dalam hal badan usaha dicabut selain karena berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat)

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, Perusahaan wajib:
1. melaporkan Hasil Produksi yang telah dieskpor namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya;
2. melunasi seluruh tagihan terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

bidang kepabeanan dan perpajakan; dan

3. menyelesaikan saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan penyelesaian, dengan cara:
   a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan/atau
   b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau penerima subkontrak);
7. Pimpinan ..... (Perusahaan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001